

PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL BERBASIS ARTIKULASI MASYARAKAT DI PANTURA JAWA BARAT

Oleh: Sri Hayati*

I. Pendahuluan

Daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat merupakan jalur strategis yang menghubungkan kota-kota Serang – Jakarta – Cirebon – Semarang. Sebagai daerah pantai yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Jawa, maka masyarakat wilayah ini memiliki karakteristik yang khas, yakni merupakan masyarakat heterogen dan terbuka terhadap perubahan. Namun demikian, mobilitas interaksi yang tinggi pada masyarakat ini menyebabkan rawan konflik, karena interaksi memberikan konsekuensi terhadap pergesekan budaya, komunikasi, dan sosial di antara kelas sosial maupun kelompok budaya yang berbeda. Selain karena perbedaan itu, juga yang terutama adalah perbedaan aksesibilitas terhadap sumber ekonomi setempat. Konflik sosial yang terjadi berupa kerusuhan baik antar-warga maupun warga dengan aparat merupakan gambaran adanya disharmoni pada masyarakat tersebut. Hal ini perlu dikaji secara komprehensif guna mengeliminir bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada masyarakat dalam melakukan artikulasi melalui saluran-saluran yang tepat.

Sebagai jalur utama yang subur dan potensial secara politik, ekonomis dan sosial, pada umumnya masyarakat Pantura memiliki karakteristik terbuka terhadap pembaharuan dan pendatang. Ciri khas masyarakat wilayah ini memiliki potensi sebagai berikut: **pertama**, mereka memiliki mentalitas *frontier* (Chiras, 1985). Artinya mereka memiliki sifat sebagai perintis. **Kedua**, pada dasarnya mereka merupakan masyarakat *mobile* (Moran, 1978). Masyarakat demikian mengisyaratkan bahwa mereka merupakan kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat (*survival of the fittest*). **Keempat**, masyarakat wilayah ini memiliki latar belakang sosial dan budaya yang heterogen. Kondisi demikian memiliki potensi untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga membentuk

subkultur baru. **Kelima**, potensi sosial tersebut merupakan faktor penunjang bagi pemberlakuan rekayasa sosial (*social engeneering*) untuk memperkenalkan suatu pendekatan pembangunan masyarakat (*human development*). Namun demikian, di sisi lain masyarakat demikian memiliki potensi konflik yang sangat tinggi. Secara sosial, potensi konflik tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: **pertama**, interaksi antar masyarakat jika tidak dikelola dengan seksama maka konflik sosial mengarah kepada tindakan kriminal akan terjadi. Kondisi ini menyebabkan terabaikannya wilayah ini dari berbagai upaya pembangunan, sehingga akselerasi pembangunan menjadi rendah. **Kedua**, meskipun masyarakat tersebut memiliki potensi yang menunjang untuk maju, namun karena konflik yang selalu muncul maka potensi tersebut tidak berkembang. Sebaliknya, mereka menjadi masyarakat tertutup, bodoh dan miskin. **Ketiga**, karena terdesak oleh keadaan, maka mentalitas *frontier* yang mereka miliki digunakan ke arah negatif, menjadi arogan dan hegemoni. **Keempat**, perbedaan akses terhadap sumber daya setempat menyebabkan konflik kepentingan berkembang, sebagai contoh terdapat perbedaan yang jelas antara kelompok masyarakat nelayan, petani, petambak.

Konflik sosial yang terjadi berupa kerusuhan baik antar-warga maupun warga dengan aparat merupakan gambaran adanya disharmoni pada masyarakat Pantura Jawa Barat. Pada saat ini, masyarakat di daerah tersebut sangat peka terhadap terjadinya keributan massal. Isu rasial, perbedaan akses terhadap sumber daya setempat, primordialisme dan tekanan penguasa merupakan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kerusuhan di daerah tersebut (Kompas, 13 Juni 2001: 1). Setiap kelompok masyarakat seperti nelayan, petambak dan petani karena kepentingan terhadap akses sumber daya air misalnya yang tumpang tindih merupakan salah satu pemicu kerusuhan. Keran demokrasi yang dibuka secara mendadak melalui reformasi politik, telah menjadikan masyarakat ini mengalami kejutan budaya (*culture shock*) di mana mereka menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan yang tanpa batas dan hukum. Di samping itu, tekanan selama puluhan tahun untuk tunduk terhadap penguasa tanpa saluran artikulasi pendapat atau pun

* Dr. Sri Hayati, M.Pd. merupakan dosen pada Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI saat ini sebagai Kepala Pusat Penelitian KLH Lembaga Penelitian UPI.

keinginan menjadikan masyarakat, setelah sekian lama bungkam dengan terpaksa, beringas tanpa kendali dalam memahami perubahan sosial yang terjadi.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kajian terhadap konflik sosial berbasis artikulasi merupakan hal yang strategis untuk dilakukan. Hal ini penting karena: (1) konflik yang terjadi sudah mengarah kepada tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, (2) konflik bukan sesuatu yang harus dihindari melainkan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi pendorong perubahan sosial yang kondusif, (3) perubahan selalu ada dan tidak dapat diredam sejalan dengan konflik yang mengiringinya, dan (4) agar masyarakat dapat secara mandiri mengelola konflik melalui artikulasi.

II. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang konseptual tersebut, maka masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan konflik sosial berdasarkan artikulasi masyarakat setempat di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat?”

Masalah tersebut secara rinci dijabarkan melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Pantura?
2. Faktor-faktor sosial budaya apakah yang mempengaruhi terjadinya konflik pada masyarakat Pantura?
3. Bagaimana artikulasi masyarakat Pantura dalam mengajukan aspirasi dan pendapat?
4. Bagaimana saluran komunikasi yang terdapat pada masyarakat Pantura dalam kaitannya dengan aspirasi dan pendapat?
5. Bagaimana peran pemuka masyarakat dan *stakeholder* masyarakat Pantura dalam mengakomodasi aspirasi dan pendapat masyarakat?
6. Bagaimana model pengelolaan konflik sosial yang efektif berbasis artikulasi masyarakat untuk sebuah perubahan sosial yang progresif dan kondusif di Pantura?

III. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konflik sosial yang terjadi di Pantura, (2) mengetahui faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial, (3) mengetahui bentuk artikulasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan pendapat, (4) mengkaji saluran-saluran komunikasi yang terdapat pada masyarakat setempat, (5) mengetahui peran pemuka masyarakat dan stake holder dalam mengakomodasi aspirasi dan pendapat masyarakat, dan (6) mengembangkan model pengelolaan konflik sosial yang efektif menuju perubahan sosial secara progresif dan kondusif.

IV. Kajian Pustaka

Masyarakat pada umumnya memiliki kecenderungan untuk konflik, ketiadaan konflik yang selama ini terjadi antara lain karena ada suatu aturan yang membuat masyarakat tidak berdaya untuk mengajukan artikulasi (Johnson, 1981:160). Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi karena adanya pertentangan atau kontradiktif kepentingan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, sehingga konflik merupakan potensi terjadinya perubahan sosial. Pada masyarakat mapan, konflik dianggap sebagai hal yang harus dihindarkan, karena dapat mengganggu *equilibrium* yang ada. Oleh karena konflik merupakan potensi laten yang terdapat pada masyarakat, maka menghindar diri dari konflik bukan merupakan pemecahan masalah yang efektif. Ketenangan yang diciptakan demikian rupa merupakan bom waktu di mana pada suatu saat jika masyarakat merasa sangat terjepit, maka tindakan progresif revolusioner akan muncul ke permukaan. Hal yang paling efektif dalam mengantisipasi keadaan tersebut adalah mengelola konflik itu sendiri, sehingga konflik merupakan potensi perubahan sosial yang progresif dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat itu sendiri.

Keadaan tersebut oleh Marx dinyatakan sebagai tindakan progresif yang revolusioner (Macionis, 1997:250). Hal ini terjadi karena ada perbedaan kelas yang demikian nyata dengan jurang pemisah semakin lebar antara penguasa dengan rakyat atau juga antara kaya dan miskin. Dengan demikian selama kelas sosial itu ada, maka konflik sosial akan terus berlangsung sebagai artikulasi dari

ketidakmapanan struktur masyarakat tersebut. Kelas atas selalu menjadi kelas penguasa (Macionis, 1997:251) karena mendapat perlindungan dari penguasa dan cenderung mempertahankan *status quo* melalui sistem *homeostasis* (Moran, 1987: 69) yang dimilikinya. Sementara itu, kelas bawah selalu menjadi obyek penguasa dengan ketidakberdayaan dan memiliki posisi tawar yang rendah sebagai ciri utamanya. Konflik terjadi manakala perbedaan di antara keduanya sudah demikian jauh di mana kelas atas lebih menekan partisi kelas bawah yang sudah demikian sempit. Jika, posisi kelas bawah semakin terjepit di antara ketidakberdayaan maka mereka cenderung bertindak progresif dan revolusioner.

Aliran fungsionalis (Johnson, 1986: 145) menjelaskan bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem yang mapan, stabil, integratif berjalan secara alami sebagai mana kehidupan organisme. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap keberadaan masyarakat yang memiliki fungsi sebagaimana organ-organ dan memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi. Jika terdapat gejala di masyarakat, maka diasumsikan bahwa terdapat disharmoni hubungan komplementer dalam anggota masyarakat yang bersangkutan yang akan berakibat pada goncangan sistem yang ada. Keadaan tersebut, menurut aliran ini, harus segera diatasi dengan cara “mengobati” organ yang disharmoni tersebut sehingga akan mencapai ke titik *equilibrium* kembali (Odum, 1978:67). Pandangan lain, yakni paradigma *interpretive*, menjelaskan bahwa masyarakat akan berinteraksi secara harmonis manakala terdapat kesamaan harapan antara satu dengan lainnya. Harapan ini dapat diekspresikan melalui simbol dan lambang sebagai tanda-tanda mengenai harapan yang terdapat dalam pikiran mereka dalam arti bahwa realitas ada pada pikiran manusia (*reality by human mind*) (Hale: 1990:27).

Konflik sosial merupakan variabel utama dalam masyarakat yang memberikan kontribusi besar dalam perubahan sosial. Di dalam konflik sosial terdapat elemen-elemen yang mempengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap: (1) pola hubungan antar kelompok masyarakat, (2) perubahan tatanan masyarakat, (3) perubahan struktur masyarakat, (4) bentuk artikulasi masyarakat, dan (5) saluran komunikasi masyarakat. Konflik sosial terjadi karena memang setiap masyarakat merupakan subyek perubahan sosial. Selain itu, masyarakat merupakan subyek yang

cenderung memiliki potensi untuk berselisih dan konflik. Dengan demikian setiap elemen pada masyarakat cenderung memberikan kontribusi terhadap perubahan dan perpecahan.

Apabila konflik sosial dipandang sebagai fenomena yang dapat mendorong terjadinya perubahan, maka terdapat peluang untuk mengelola konflik sebagai modal untuk terjadinya perubahan sosial yang kondusif dan progresif ke arah kemajuan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, secara konseptual dapat diduga bahwa semakin baik pengelolaan konflik sosial yang terdapat pada masyarakat, maka semakin kondusif dan progresif perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut, lebih jauh akan semakin baik kualitas masyarakat tersebut.

V. Model Pengelolaan Konflik Berbasis Masyarakat

Strategi pengelolaan konflik berbasis artikulasi masyarakat merupakan keterpaduan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melalui saluran-saluran artikulasi yang ada. Pengembangan artikulasi pada tingkat masyarakat memiliki arti yang strategis, karena masyarakat secara langsung berkepentingan atas pengelolaan konflik secara mandiri. Pada akhirnya masyarakat setempat dapat memanfaatkan konflik untuk melakukan perubahan secara kondusif. Masyarakat merupakan kelompok pelaksana program yang secara langsung dan memiliki tugas utama memberikan kontribusi terhadap sistem secara keseluruhan. Selain itu, mengembangkan partisipasi yang menggunakan sistem intensif dan disintensif, bukan menggunakan kekuasaan.

Konsep dan implementasi pengelolaan konflik berbasis artikulasi masyarakat harus dikembangkan berdasarkan persetujuan bersama dan terdapat kepentingan timbal balik antara masyarakat dengan pihak lain yang secara formal bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik sosial dilakukan. Tanggung jawab utama yang diemban oleh masyarakat antara lain adalah mengelola konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Konflik ini timbul selain karena ketidaktahuan tentang aturan yang berlaku, juga karena adanya keterbatasan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Pemuka masyarakat dalam hal ini dapat membina masyarakat umum untuk dapat memahami konsep pengelolaan konflik sosial

sehingga dalam pelaksanaannya mereka akan memperhatikan fungsi dari saluran-saluran komunikasi yang ada untuk mengeluarkan pendapatnya.

VI. Strategi Pengelolaan Konflik

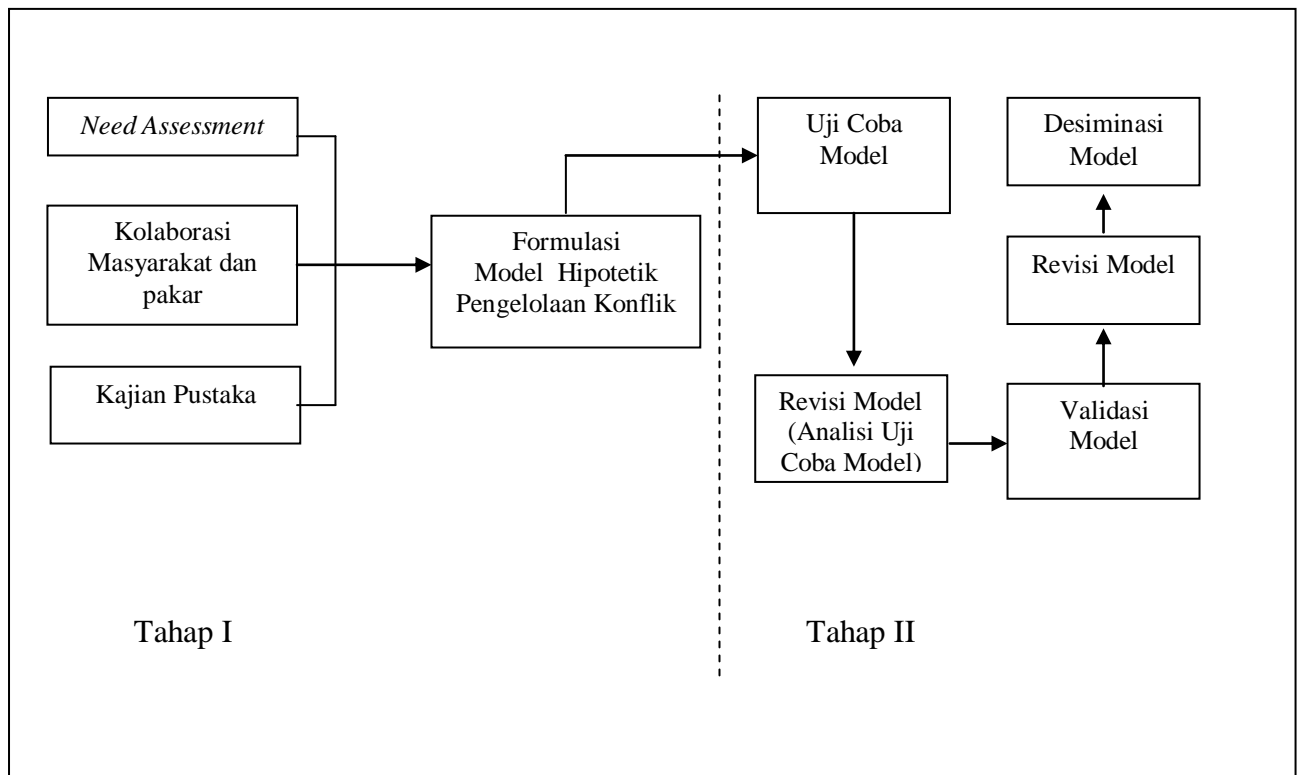
A. Formulasi Model Pengelolaan Konflik

Strategi pada tahap awal dilakukan dengan cara memformulasikan model pengelolaan konflik berbasis artikulasi yakni dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan cara *network analysis*. Hal ini dilakukan guna menjaring data berkenaan dengan potensi konflik, saluran aspirasi yang ada, bentuk artikulasi masyarakat, jaringan komunikasi sosial, peranan pemuka masyarakat dan *stakeholder*, kebutuhan masyarakat akan pengelolaan konflik, tantangan dan kendala dalam pengelolaan konflik, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pengelolaan konflik sosial. Selain dilakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat, dilakukan pula kolaborasi dengan para pakar yang berkaitan dengan konflik, artikulasi, dan perubahan sosial. Selanjutnya, berdasarkan analisis data yang telah dijaring diperkaya dengan studi literatur, maka disusun formulasi model hipotetik pengelolaan konflik sosial berdasarkan artikulasi masyarakat setempat.

B. Penerapan Model Pengelolaan Konflik

Penerapan model pengelolaan konflik merupakan implementasi keefektifan model hipotetik yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Kajian keefektifan model hipotetik pengelolaan konflik sosial dilakukan melalui tahapan: (1) uji coba model hipotetik putaran pada sampel terbatas dengan cara kegiatan aksi terhadap berbagai komponen masyarakat Pantura mulai dari personal kunci yakni pemuka masyarakat, *stakeholder* yakni pemegang kebijakan setempat, sampai kepada masyarakat umum; (2) analisis berupa penilaian terhadap efektifitas model yang diterapkan; (3) melakukan revisi model; (4) uji validasi model untuk terhadap wilayah yang lebih luas untuk menguji keefektifan model yang telah direvisi; (5) analisis hasil dan revisi model; dan (6) desiminasi model pengelolaan konflik sosial berbasis artikulasi masyarakat.

Strategi tersebut di atas secara visual dapat digambarkan melalui bagan berikut:



VIII. Penutup

Mobilitas interaksi yang tinggi pada masyarakat ini menyebabkan rawan konflik, karena interaksi memberikan konsekuensi terhadap gesekan budaya, komunikasi, dan sosial di antara kelas sosial maupun kelompok budaya yang berbeda. Selain karena perbedaan itu, juga yang terutama adalah perbedaan aksesibilitas terhadap sumber ekonomi setempat. Konflik sosial yang terjadi berupa kerusuhan baik antar-warga maupun warga dengan aparat merupakan gambaran adanya disharmoni pada masyarakat tersebut.

Konflik yang terjadi sudah mengarah kepada tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Pengembangan artikulasi pada tingkat masyarakat memiliki arti yang strategis, karena masyarakat secara langsung berkepentingan atas pengelolaan konflik secara mandiri. Oleh karena perubahan selalu ada dan tidak dapat diredam sejalan dengan konflik yang mengiringinya, maka diharapkan

masyarakat dapat secara mandiri mengelola konflik melalui artikulasi. Dengan demikian konflik jika dikelola sedemikian rupa maka akan menjadi pendorong perubahan sosial yang kondusif. Semoga !!

Pustaka Acuan

Burger, Jerry M.(1986). *Personality: Theory and Research*. Bemont, California: Wadsworth Pub. Co.

Chiras, Daniel D.(1991). *Environmental Science: Action for a Sustainable Future*. California: The Benjamin/Cummings Pub. Co. Inc.

Hale, Sylvia M. (1990). *Controversies in Sociology*. Toronto: Copp Clark Pitman Ltd.

Inkeles, Alex & Smith, David H.. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.

Johnson, Doyle Paul. (1981). *Sociological Theory*. Florida: John Wiley&Sons, Inc.

Khisbiyah, Yayah. Dkk. (2000). *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: PPIRM-TAF-Pustaka Pelajar.

Krech, David. Crutchfield, Richard S. & Ballachey, Egerton L.(1988). *Individual in Society*. N.Y.: McGraw-Hill Co.

Macionis, John J. (1997). *Sociology*. N.J.: Prentice Hall.

Soroka, Michael P. & George J. Bryjak. (1995). *Social Problems: A World At Risk*. Boston: Allyn and Bacon.